

PERAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Yandra Pratama

NPP 30.0263

Asdaf Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: yandrapratama26@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Halilul Khairi, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *The National Unity and Politics Agency of Kampar Regency is led by a head as the command holder for the implementation of duties and functions. The Head of the National Unity and Politics Agency of Kampar Regency carries out his role in fostering community organizations as people who have a position in the people of Kampar Regency. In carrying out this role, the Head of the National Unity and Politics Agency of Kampar Regency needs to accelerate the formation of Organizations through policies that support the development of Community Organizations so that they can be in line with the Constitution and Pancasila.* **Purpose:** *The purpose of this study is to identify and analyze the role of the head of the National Unity and Politics Agency in the Development of Community Organizations in Kampar District, Riau Province.* **Method:** *The method used in this research is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data in this study were collected through observation, interviews, documentation and data triangulation. The data analysis process was carried out using open coding, followed by axial coding, and ended with selected coding.* **Results/ Findings:** *The results of the study show the role of the Head of the National Unity and Politics Agency in Fostering Community Organizations in Kampar Regency, Riau Province, namely his role in making policies for the formation of a special team for community development and policies related to the budget. In addition, the head of the National Unity and Politics Agency of Kampar district also plays a role in implementing the strategy for fostering mass organizations. The next role is to build communication with the community to get information and input from the community. Then it also acts as a dispute resolution tool by becoming a facilitator or mediator. The last role that is carried out is acting as a provider of therapy/rehabilitation to community organizations that are facing problems. This is done by forming a Special Team for the rehabilitation of grant funds and conducting direct communication with Community Organizations with problems by providing advice and input in resolving problems faced by Community Organizations.* **Conclusion:** *The Head of the National Unity and Political Agency of Kampar Regency was not carried out his role well in guiding community organizations in Kampar Regency, Riau Province.*

Keywords: Role, Coaching, Community Organization

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang kepala sebagai pemegang komando pelaksanaan tugas dan fungsi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar menjalankan perannya dalam pembinaan organisasi masyarakat sebagai orang yang memiliki kedudukan di masyarakat Kabupaten Kampar. Dalam menjalankan peran tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar perlu mempercepat terjadinya pembinaan kepada Organisasi melalui kebijakan-kebijakan yang menunjang terjadinya pembinaan Organisasi Masyarakat sehingga bisa sejalan dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan pengkodean terbuka (*open coding*) lalu diikuti dengan tahapan pengkodean proses (*axial coding*), dan diakhiri dengan pengkodean terpilih (*selected coding*). **Hasil/ Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan Peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yakni berperan dalam membuat kebijakan pembentukan tim khusus pembinaan masyarakat serta kebijakan terkait dengan anggaran. Selain itu, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kampar juga berperan dalam melakukan strategi pembinaan ormas. Peran selanjutnya yakni membangun komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan Informasi dan masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian juga berperan sebagai alat penyelesaian sengketa dengan menjadi Fasilitator atau penengah. Peran terakhir yang dilaksanakan yakni berperan sebagai pemberi terapi/rehabilitasi kepada organisasi masyarakat yang menghadapi permasalahan. Hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Khusus rehabilitasi dana hibah serta melakukan Komunikasi langsung dengan Organisasi Masyarakat yang bermasalah dengan memberikan nasehat serta masukan-masukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Organisasi Masyarakat. **Kesimpulan:** Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar belum menjalankan perannya dengan baik dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kata Kunci: Peran, Pembinaan, Organisasi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi masyarakat adalah forum asosiasi berkumpul untuk mencapai kesepakatan dimana mereka memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka dan diwakili oleh kelompok kepentingan sosial, etnis, ras, agama, dan lainnya. Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dibuat dengan harapan dapat memajukan persatuan semua jenis perkumpulan dan elemen majelis, mulai dari organisasi semua jenis masyarakat dengan jenis dan bidang kegiatannya masing-masing dalam satu tatanan.

Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 bahwa “setiap orang atau perkumpulan (organisasi masyarakat) dilarang melakukan premanisme”. Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan *isme*/aliran adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain (March, 2013).

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Sebagian kelompok masyarakat usia kerja mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Namun jika kita cermati selain ekonomi yang sulit kemunculan premanisme juga disebabkan karena Pemerintah kurang penanaman moral yang baik bagi rakyat, Menghambat terjadinya kemerosotan moral yang memprihatinkan bangsa ini. Badan kesatuan bangsa dan politik sebagai pemerintah yang bertanggung jawab terhadap ormas, sehingga perlu mewaspadaai kenyataan ini.

Pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar adalah salah satu Badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai unsur penunjang pemerintah Kabupaten Kampar di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta berwenang memberikan pembinaan kepada organisasi masyarakat, untuk mempercepat pembinaan di perlukan peran Kepala badan Kesbangpol untuk mempercepat terjadinya pembinaan kepada Organisasi melalui kebijakan-kebijakan yang ia buat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah yang terlihat dalam permasalahan ini adalah kurangnya pelaksanaan pembinaan atau pelatihan yang optimal terhadap Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar sebelum tahun 2022. Hal ini terbukti dengan masih adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat yang terekspos oleh media dan menjadi viral di media sosial. Pembinaan yang baik diharapkan dapat menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh ormas, serta meningkatkan kemampuan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih terarah dan tepat sasaran.

Ketika suatu ormas mendapatkan pembinaan yang baik, mereka akan lebih mampu membedakan antara tindakan yang berguna dan baik, serta akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai hal yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Peran dalam konteks ini diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh individu yang berkedudukan dalam masyarakat, sementara peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dalam suatu peristiwa. Namun apabila pelatihan dan pembinaan tidak dilaksanakan secara memadai, terdapat kesenjangan yang menciptakan celah bagi Organisasi Masyarakat untuk melakukan tindakan negatif. Kurangnya pemahaman dan keterampilan yang diperoleh melalui pembinaan yang kurang optimal dapat memengaruhi perilaku anggota ormas, yang pada gilirannya dapat mengarah pada tindakan kekerasan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diharapkan dari sebuah organisasi masyarakat.

Berdasarkan kasus kekerasan yang terjadi sebelumnya, penulis telah menghubungi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendapatkan klarifikasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh Organisasi Masyarakat hingga menyebabkan korban jiwa. Selain itu, Kepala Daerah Kabupaten Kampar juga memberikan instruksi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjadi lebih berperan aktif dalam pengawasan langsung, kebijakan, dan memberikan perintah khusus kepada bawahan untuk

melaksanakan pembinaan Organisasi Masyarakat guna mencegah terjadinya tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Pancasila.

Dalam konteks ini, peran yang harus dilaksanakan oleh lembaga/organisasi umumnya diatur dalam suatu ketetapan yang menjadi fungsi dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjalankan perannya dalam pembinaan Organisasi Masyarakat sebagai individu yang memiliki kedudukan di masyarakat dan sebagai pejabat yang berwenang. Dengan demikian, melalui pembinaan yang efektif dan peran yang aktif dari lembaga terkait, diharapkan kesenjangan masalah yang terjadi dalam permasalahan ini dapat diminimalisir dan tujuan organisasi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi referensi peneliti merupakan oleh Ichsan Malik dalam skripsinya berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta harus memformulasikan program pembinaan Organisasi Masyarakat hingga pemantauan dan penanganan konflik dengan menambahkan subjek sasaran, yaitu level akar rumput.

Penelitian kedua yang menjadi referensi adalah penelitian oleh Rudi Selwandi dalam skripsinya yang berjudul “Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan ormas oleh kesbangpol Kabupaten Siak belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Faktor penghambat pembinaan adalah Tidak tersedia anggaran dana untuk melakukan pembinaan disebabkan rencana kerja yang ada dikantor kesbangpol hanya tentang anggaran untuk fasilitas dan pelayanan administrasi.

Penelitian ketiga yang menjadi referensi adalah penelitian dari Haditianur dalam skripsi berjudul “Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pembinaan ormas yang dijalankan terdapat 60 ormas dengan beberapa kegiatan yang dilakukan kesbangpol. Sedangkan untuk kendala yang ditemukan dilapangan dimana banyaknya Ormas yang belum mengerti tentang Peraturan Pemerintah, tidak rutinnya laporan Ormas kepada Kesbangpol, dan masih ada Ormas yang pindah alamat namun tidak mendaftarkan alamat baru.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pada peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan organisasi masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Teori yang digunakan juga berbeda yaitu teori peran menurut Horopoetri, Arimbi dan Sentosa yang terdiri atas lima dimensi diantaranya peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai suatu strategi, peran sebagai komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan alur pengkodean. Lokasi penelitian berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Peneliti telah melaksanakan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Riau untuk menggali peran kepala Bakesbangpol dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap 5 informan.

Horoepoetri, Arimbi dan Sentosa (2003) menjelaskan ada dimensi dalam teori peran diantaranya peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai suatu strategi, peran sebagai komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi.

3.1.1 Berperan Dalam Membuat Suatu Kebijakan

Peran dalam membuat suatu kebijakan berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengambil suatu kebijakan yaitu kebijakan dalam membentuk tim khusus dan dana dalam pembinaan Organisasi Masyarakat. Timsus ini bukan hanya dari Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada juga dari beberapa instansi yaitu TNI, POLRI, dan PERKOPIMDA yang bekerja sama untuk melakukan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar, khusus timsus yang dibentuk oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari beberapa timsus Pembinaan Organisasi Masyarakat dan mereka Bekerja sesuai tupoksi. Selanjutnya penggunaan dana khusus untuk melakukan penggunaan anggaran terkait pembinaan Organisasi masyarakat dan demi kelancaran Operasional Pembinaan Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar, dalam mengambil Kebijakan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu melakukan kordinasi kepada bawahan dan juga ketua Organisasi Masyarakat Dalam Kebijakan tersebut masih belum berjalan mulus karena masih adanya Organisasi masyarakat yang tidak mau melakukan kerjasama dan belum terdaftar di Kesbangpol Kampar dalam artian masih kurangnya sikap disiplin yang dimiliki beberapa oknum Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar

Peneliti menarik kesimpulan Peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membentuk Timsus dan penggunaan anggaran khusus pembinaan Organisasi Masyarakat Berdampak positif dalam menangani permasalahan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar tetapi dampak tersebut belum dirasakan secara keseluruhan oleh semua Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar.

3.1.2 Berperan Dalam Membuat Strategi

Peran dalam membuat strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*Public supports*). Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti belum menemukan strategi yang efektif yang dilakukan oleh Kepala Badan dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat dalam mendapatkan dukungan dari Masyarakat Hanya saja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

sering terjun langsung kelapangan ke Masyarakat untuk Mengetahui Problem apa yang sedang dihadapi oleh Organisasi Masyarakat, serta Timsus yang telah dibentuk oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga ikut andil Kelapangan.

Peneliti menyimpulkan bahwasannya strategi yang di lakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendapatkan support dari Masyarakat belum ada, berdasarkan dari wawancara penulis kepada Informan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya melakukan blusukan ke Masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang problem apa yang sedang dihadapi Organisasi Masyarakat.

3.1.3 Berperan Dalam Membangun Komunikasi Kepada Masyarakat

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat tuntut mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, Sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai daya guna mewujudkan keputusan yang *responsive* dan *responsible*. Berdasarkan Hasil temuan dilapangan dilapangan, penulis belum menemukan Kegiatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan Komunikasi dengan Masyarakat sebagai instrument dalam Proses pengambilan keputusan yang berupa informasi dan masukan-masukan dari Masyarakat.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa, Peneliti belum menemukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melakukan pendekatan Komunikasi Kepada Masyarakat untuk mendapatkan Informasi dan masukan-masukan dari Masyarakat sebagai Instrumen pengambilan Keputusan yang tepat dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat hanya saja informasi yang di dapatkan dari informan peneliti Kepala Badan sudah Melakukan pendekatan Komunkasi dengan Masyarakat dengan langsung terjun kelapangan dengan melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik demi menjaga komunikasi yang baik terhadap masyarakat, hal ini di nilai efektif oleh Masyarakat Karena pejabat dan Masyarakat bisa bertemu langsung di suatu forum dan saling bertukar isi kepala.

3.1.4 Berperan Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidak percayaan dan kerancuan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, peneliti menemukan Peran Kepala Badan sebagai alat penyelesaian sengketa dari beberapa dokumentasi dan Data Kepala badan sudah banyak melakukan penyelesain sengketa sebagai fasiliator atau penengah antara Organisasi bersengketa, baik Organisasi dengan Organisasi maupun Organisasi dengan Masyarakat, serta dalam penyelesaian sengketa ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga di bantu oleh tim Khusus penyelesain sengketa dan bidang Organisasi Masyarakat, data menunjukkan sudah banyak penyelesaian sengketa yang terselesaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Tim khusus yang terjadi.

Peneliti mampu menyimpulkan bahwa menurut data Peran Kepala Badan dalam Penyelesaian sengketa sudah berjalan dengan baik dengan melakukan beberapa cara yang tepat yaitu membentuk Tim khusus pnyelesain sengketa sebagai pencari Informasi terkait sengketa yang ada, serta Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berperan aktif dalam

Penyelesaian sengketa yang ada, dengan menjadi Fasilitator atau penengah dalam penyelesaian sengketa yang ada di Kabupaten Kampar.

3.1.5 Berperan Sebagai Pemberi Terapi/Rehabilitasi Kepada Organisasi Masyarakat yang Menghadapi Permasalahan

Peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah masyarakat seperti halnya rasa ketidak berdayaan, Tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. Berdasarkan temuan dilapangan, penulis belum menemukan Peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan rehabilitasi ataupun terapi bagi Organisasi bermasalah di Kabupaten Kampar, tetapi penulis menemukan Timsus yang di bentuk oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menangani masalah organisasi yang bermasalah dengan memberikan dana hibah, dengan dana ini diharapkan bisa membantu Organisasi Masyarakat untuk bangkit dari permasalahan yang di hadapi.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan rehabilitasi terhadap organisasi yang bermasalah belum ditemukan, tetapi menurut Informasi dari informan rehabilitasi sudah dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah dilakukan dengan melakukan pembentukan tim khusus Rehabilitasi dana hibah serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan Komunikasi langsung dengan Organisasi Masyarakat yang bermasalah dengan memberikan nasehat serta masukan-masukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Organisasi Masyarakat tersebut, Hal ini membuat situasi di Kabupaten Kampar terbilang kondusif karna sudah minim permasalahan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar terjadi.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ditemukan beberapa temuan utama. Pertama, dalam membuat kebijakan, Kepala Kesbangpol telah mengambil langkah dengan membentuk tim khusus dan menggunakan dana khusus untuk pembinaan Organisasi Masyarakat. Tim ini terdiri dari berbagai instansi, termasuk yang bekerja sama dalam melakukan pembinaan. Meskipun kebijakan ini telah diimplementasikan, masih terdapat Organisasi Masyarakat yang tidak mau bekerja sama dan belum terdaftar di Kesbangpol Kampar. Kedua, dalam membuat strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat, penelitian ini belum menemukan strategi yang efektif yang dilakukan oleh Kepala Kesbangpol dalam pembinaan Organisasi Masyarakat. Namun, Kepala Kesbangpol terjun langsung ke lapangan untuk memahami masalah yang dihadapi oleh Organisasi Masyarakat, dan tim yang telah dibentuk juga turut serta dalam upaya ini. Ketiga, dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, penelitian ini belum menemukan kegiatan yang jelas dilakukan oleh Kepala Kesbangpol sebagai instrumen untuk mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembinaan Organisasi Masyarakat. Meskipun Kepala Kesbangpol melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi kepada masyarakat serta melakukan komunikasi langsung dengan mereka, belum ada pendekatan yang sistematis dalam menggunakan komunikasi sebagai alat pengambilan keputusan yang tepat. Keempat, Kepala Kesbangpol terlibat dalam menyelesaikan sengketa antara Organisasi Masyarakat. Dalam peran ini, Kepala Kesbangpol telah berperan sebagai fasilitator atau penengah dalam beberapa sengketa yang terjadi antara Organisasi Masyarakat, maupun antara

Organisasi Masyarakat dan masyarakat umum. Kepala Kesbangpol dibantu oleh tim khusus penyelesaian sengketa dalam upaya mencari informasi terkait sengketa yang ada. Kelima, dalam memberikan terapi atau rehabilitasi kepada Organisasi Masyarakat yang menghadapi masalah, penelitian ini belum menemukan peran yang jelas dilakukan oleh Kepala Kesbangpol. Namun, terdapat tim khusus yang dibentuk oleh Kepala Kesbangpol untuk menangani masalah organisasi dengan memberikan dana hibah. Diharapkan dana tersebut dapat membantu organisasi untuk bangkit dari masalah yang dihadapi.

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar telah memberikan dampak positif dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Namun, dampak tersebut belum dirasakan secara keseluruhan oleh semua Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek peran yang masih perlu diperkuat, seperti pengembangan strategi, pendekatan komunikasi yang lebih sistematis, dan pemberian terapi atau rehabilitasi yang lebih terfokus.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan organisasi masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang berbeda yang berkaitan dengan peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan organisasi masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Allah SWT dan Kedua orang tua, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, M. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius
- Barnard, Chester. 1938. *The Functions of the Executive*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Bryant, dan. White dalam Amira. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hadi, T. (2022). *Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019*. Universitas Jambi

- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi
- Malik, Ichsan. (2018). *Peran Kesbangpol dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Tirtayasa
- March F Makaampoh. (2013). Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP. *Lex et Societatis, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013*
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya
- Mulyadi, Mohammad. 2012. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Nadi Pustaka
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rudi, S. (2018). *Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak*. Administrasi Publik
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Wahjosumidjo. 2005. *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teori dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yazan, B. (2015). *The Qualitative Report. Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin, Merriam, and Stake*. 20 (2), hlm. 134-152.
- Yoganingrum, Ambar dkk. 2009. *Merajut Makna: Penelitian Kualitatif Bidang Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Penerbit Cita Karyakarsa mandiri
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang tugas pokok dan fungsi KESBANGPOL
- PERPPU no. 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-undang no. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017